

PENELITIAN

**EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN OLAHRAGA PRESTASI DI SEKOLAH
KHUSUS OLAHRAGA (SKO) RAGUNAN JAKARTA**

Niluh Kerti Maryasih

NIDN : 0320096903

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA)**

TAHUN 2023

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN OLAHRAGA PRESTASI DI SEKOLAH KHUSUS OLAHRAGA (SKO) RAGUNAN JAKARTA

ABSTRAK

Pembinaan di bidang olahraga diarahkan untuk membangkitkan budaya gemar berolahraga bagi masyarakat guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia baik secara jasmani maupun rohani sehingga memiliki daya tahan yang kuat dalam menjalani kehidupan dewasa ini. Untuk mendorong keberhasilan program pembinaan olahraga ini, pemerintah Indonesia dari tingkat pusat hingga tingkat kabupaten telah memberikan kesempatan dan layanan pendidikan kepada segenap pemuda untuk mengikuti pendidikan olahraga bagi yang memiliki bakat olahraga melalui sekolah atlet yang sudah ada di beberapa profinsi dan juga ada Kelas Khusus Olahraga (KKO) di beberapa SMA di Indonesia. Salah satunya Sekolah Khusus Olahraga Ragunan yang merupakan salah satu sekolah atlet di Indonesia yang berdiri tahun 1977 di Jakarta.

Kata Kunci : *Evaluasi, Kebijakan, Sekolah Khusus Olahraga, Prestasi Atlit*

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU-SKN) pasal 17 bahwa ruang lingkup olahraga meliputi (a.) Olahraga pendidikan: Pengembangan kurikulum Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Peningkatan kualitas guru, Pendidikan Jasmani dan Peningkatan sarana prasarana olahraga. (b.) Olahraga Rekreasi: penataan kegiatan olahraga rekreasi, peningkatan kualitas infrastruktur dan peningkatan sarana prasarana. (c.) Olahraga prestasi: Sistem pembinaan berjenjang dan prioritas cabang olahraga unggulan dan identifikasi pemanduan bakat, pengembangan bakat, regionalisasi pembinaan, optimalisasi pembinaan PPLP/PPLM dan sekolah khusus olahraga, inverstasi dan implementasi IPTEK dan pemberdayaan sesuai jalur pembinaan, jaminan masa depan atlet dan Sumber Dana.

Pembangunan dibidang olahraga harus mencakup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi, ketiganya dikembangkan secara seimbang untuk mencapai tujuan olahraga sesuai diamanatkan (UU-SKN,2005) yaitu gerakan olahraga untuk semua orang yang sudah dirintis sejak tahun 1980-an di Indonesia, sudah seharusnya berkembang lebih baik di masa yang akan datang. Gerakan Nasional yang melahirkan panji olahraga "memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat".

Olahraga Kompetitif Bagi masyarakat pada umumnya olahraga itu identik dengan aktivitas jasmani yang berisikan permainan yang dilaksanakan dalam bentuk pertandingan atau perlombaan dengan tujuan meraih kemenangan. Olahraga kompetitif yang karena berorientasi pada prestasi setinggi-tingginya, hanya dapat dilaksanakan oleh segelintir atlet, sehingga dapat disebut olahraga elit (Lutan,2001). Seperti kegiatan olahraga pada umumnya, olahraga merupakan subbagian dari permainan yang secara nyata menonjolkan keterampilan gerak, daya tahan, kekuatan, kecepatan dan koordinasi gerak. Pada awalnya, struktur bangunan pembinaan olahraga lazim disebut "model piramyd" yang secara umum percaya bahwan perluasan partisipasi masyarakat dalam berolahraga menjadi landasan, terutama bagi perkembangan olahraga prestasi. Pendidikan jasmani dan rekreasi (olahraga masyarakat) juga dipandang sebagai landasan pembinaan pada tahap berikutnya. Karena itu pula dipercaya bahwa keterdidikan dalam pendidikan jasmani sedemikian penting, bukan saja untuk membekali kompetensi mengisi waktu luang dengan kegiatan rekreasi yang menyehatkan dan diresdusi masyarakat, tetapi juga menjadi pondasi bagi pembinaan olahraga prestasi.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 pengertian olahraga adalah "Segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial". (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional). Perkembangan olahraga saat ini sangat pesat, hal ini ditandai dengan semakin banyaknya orang melakukan kegiatan olahraga, dari berbagai usia, baik tua muda maupun anak-anak. Tujuan orang melakukan kegiatan olahraga bermacam-macam

tergantung pada kondisi, situasi atau kebutuhan dari masing-masing individu. Ketika orang berolahraga dengan tujuan untuk pendidikan atau pembinaan, dilakukan di sekolah-sekolah mulai dari taman kanak-kanak sampai pendidikan tinggi. Jika tujuannya mengarah kepada olahraga prestasi, maka kegiatan olahraga nya tersebut harus dilakukan secara terprogram dan sistematis serta harus ditangani oleh pelatih yang ahli dibidangnya. Pelatih yang berkompeten bisa mencetak atlet-atlet yang handal dan berprestasi karena pelatih bisa mengamati segala kekurangan dan kelebihan dari atletnya baik saat latihan maupun saat bertanding. Tetapi untuk mencetak atlet berprestasi selain faktor pelatih, sarana dan prasarana juga sangat mempengaruhi prestasi seorang atlet.

Sesuai dengan tuntutan kebutuhan pendidikan bagi anak yang memiliki bakat istimewa dalam bidang olahraga, maka perlu adanya sebuah layanan pendidikan khusus bagi anak-anak tersebut untuk mengembangkan bakat dan minatnya itu. Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5 ayat 4 yang berbunyi “Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus”. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi anak yang memiliki kesulitan dalam mengikuti pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa (Undang-Undang Sistem Pendidikan NasionalL pasal 32 ayat 1).

Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan Nasional). Prestasi dapat tercapai bukan karena melakukan latihan yang keras tetapi melakukan latihan yang tepat. Dan latihan yang tepat adalah apabila dapat meningkatkan kebugaran atau kondisi fisik atlet.

Olahraga prestasi bisa dicapai dengan maksimal apabila ditunjang oleh sarana dan prasarana yang professional serta penggunaannya harus dengan penuh tanggung jawab. Olahraga mempunyai peranan penting dalam pembangunan nasional sehingga harus diimbangi dengan perkembangan sumber daya manusia untuk mewujudkan

pencapaian prestasinya, karena sumber daya manusia merupakan faktor utama yang dapat menjalankan pembinaan dan pengembangan. Selain sumber daya manusia, faktor lain yang harus dipenuhi adalah organisasi atau manajemen, sarana prasarana yang baik, program latihan yang sistematis serta pendanaan yang memadai. Dengan pembinaan yang baik sejak usia dini maka akan terbentuk atlet berbakat yang menjadi atlet handal yang akan mengharumkan nama bangsa dan negara.

Dalam pembinaan olahraga berprestasi ini Pemerintah telah memberikan kesempatan dan layanan pendidikan kepada segenap pemuda untuk mengikuti pendidikan olahraga bagi yang memiliki bakat olahraga melalui sekolah atlet salah satunya adalah Sekolah Khusus Olahraga (SKO) Ragunan yang merupakan salah satu sekolah atlet di Indonesia yang didirikan sebagai wadah pembinaan calon atlet agar bakat yang dimiliki masing-masing atlet sesuai cabang olahraganya dapat dimaksimalkan sehingga akan muncul atlet-atlet berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Melalui SKO Ragunan ini, diharapkan akan muncul calon-calon atlet yang unggul yang mampu berkompetisi dengan atlet-atlet lain di dunia. Untuk meningkatkan kemampuan mental, fisik, dan teknis, SKO Ragunan perlu diberikan program pembinaan dan diklat yang mantap, terorganisir, terarah, sistematis, dan komprehensif agar terbentuk atlet yang tangguh dan berdaya juang tinggi dalam meraih prestasi. Melalui pembinaan dan pengembangan di SKO Ragunan, siswa diharapkan memiliki disiplin, sportif, *achievement motivation*, produktif, dan profesional sehingga dapat meraih prestasi olahraga sampai tingkat dunia.

SKO Ragunan merupakan sekolah yang didirikan oleh Ali Sadikin yang pada saat itu sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ali Sadikin mengajukan gagasan mendirikan sekolah yang selain memperhatikan pengajaran pendidikan, juga pembinaan prestasi olahraga dan gagasannya ini didukung oleh Sarif Thayep selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan D. Suprayogi selaku Ketua Umum KONI Pusat sehingga terbentuklah suatu sekolah yang siswanya adalah atlet-atlet yang berprestasi pada cabang masing-masing yang berasal dari daerah-daerah di seluruh Indonesia. Sekolah tersebut dinamakan SLTP/SMU Negeri Ragunan Jakarta, yang berlokasi di daerah Ragunan, Jakarta selatan dan diresmikan pada tanggal 15 Januari 1977. Selanjutnya,

SK No. 012/0/1977 diadakan pembaharuan dengan keputusan bersama yang ditandatangani oleh Menpora, Mendikbud, Ketua Umum KONI Pusat dan Gubernur DKI Jakarta.

Pengertian Olahraga

Bila kita ingin mengembangkan olahraga, maka kita perlu memahami dua ; hal ini, yaitu (tujuan), dan (isi kegiatannya). Pada saat ini dalam perkembangannya, olahraga sebagai istilah umum, semakin kompleks masalahnya dan semakin beragam jenis kegiatannya, seperti itu juga halnya aneka motif para pelaku yang terlibat di dalamnya. Prof. Klaas Rijsdorp dalam Lutan (2001) makna kata olah dan raga.

Kata atau istilah “olahraga” di Indonesia sudah sangat akrab dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bertanah air. Dari anak-anak sampai orang tua, dari rakyat biasa sampai para pejabat, dari desa sampai ke kota, laki-laki dan perempuan, semua kenal olahraga. Olahraga dianggap sesuatu yang penting dalam kehidupan. Berbagai slogan diucapkan seperti “tiada hari tanpa olahraga”, “olahraga menjadikan orang sehat”, “olahraga membangun karakter bangsa” dan tahun 1980an muncul gerakan “memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat”, bahkan di mas media, baik cetak maupun elektronik terdapat ruang khusus berita olahraga. Anggapan pentingnya olahraga ini ditunjukkan dengan adanya lembaga atau instansi pemerintah yang mengurusinya dan aturan yang mengikatnya, yakni UndangUndang Sistem Keolahragaan Nasional (2005). Di tingkat pusat ada Kementerian Pemuda dan Olahraga, di provinsi ada Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dinas Olahraga ataupun urusan olahraga masuk dalam salah satu dinas, begitu juga dengan di kabupaten/kota. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Dinas Pendidikan di provinsi maupun kabupaten/kota memuat mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan dalam naungan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (2003). Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan berbagai program studi di Fakultas pada Universitas atau Sekolah Tinggi. Dengan demikian, pada dasarnya bangsa Indonesia memang menganggap olahraga penting. Untuk memahami apa itu “olahraga”, maka kita perlu menyepakati definisi olahraga itu sendiri

agar dalam memahaminya tidak rancu. Ayat 4 Pasal 1 Bab I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional menyebutkan olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

Selanjutnya, pasal 17 Bab VI menyebutkan bahwa ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan (a) olahraga pendidikan, (b) olahraga rekreasi, (c) olahraga prestasi. Kemudian, pada pasal 4 Bab II disebutkan bahwa keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Keolahragaan nasional itu sendiri dijelaskan pada ayat 2 pasal 1 Bab I adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga. Untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional perlu dibangun sistem keolahragaan nasional. Pada ayat 3 disebutkan bahwa sistem keolahragaan nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistematis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional. Sebagaimana ruang lingkup olahraga di atas, maka kita dapat menentukan definisinya, yakni olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Pasal 18 ayat (1) menyebutkan olahraga pendidikan diselenggarakan sebagai bagian proses pendidikan. Selanjutnya, pada pasal 25 ayat (1) disebutkan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional dan ayat (2) menyatakan bahwa olahraga pendidikan dilaksanakan melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru/dosen olahraga yang berkualifikasi dan memiliki sertifikat kompetensi serta didukung prasarana dan sarana olahraga yang memadai. Dalam sistem pendidikan, olahraga pendidikan merupakan salah satu mata pelajaran yang disebut Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan (PJOK). Menurut Kurikulum-2013

disebutkan bahwa pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan, bertujuan untuk mengembangkan aspek kebugaran jasmani, keterampilan gerak, keterampilan berfikir kritis, keterampilan sosial, penalaran, stabilitas emosional, tindakan moral, aspek pola hidup sehat dan pengenalan lingkungan bersih melalui aktivitas jasmani, olahraga dan kesehatan terpilih yang direncanakan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional . Ruang lingkup berikutnya adalah olahraga rekreasi. Pada pasal 19 ayat (1) disebutkan bahwa olahraga rekreasi dilakukan sebagai bagian proses pemulihan kembali kesehatan dan kebugaran dan pada pasal 26 ayat (1) berbunyi pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi dilaksanakan dan diarahkan untuk memasalkan olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial dan ayat (4) menyatakan bahwa olahraga rekreasi dilaksanakan berbasis masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan masal (5 M). Selanjutnya, tentang ruang lingkup olahraga prestasi pada pasal 20 ayat (1) menyebutkan olahraga prestasi dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Kemudian pada pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi olahraga pada tingkat daerah, nasional, dan internasional dan dipertegas pada ayat (2) bahwa pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi dilakukan oleh induk organisasi cabang olahraga dan ayat (3) dilakukan oleh pelatih yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi yang dapat dibantu oleh tenaga keolahragaan dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setelah kita memahami konsep olahraga dalam tataran perundangan, maka diharapkan kita akan lebih mengerti, dapat melihat, menilai, dan juga melaksanakan kegiatan olahraga apa. Tujuan, regulasinya, proses kegiatan atau aktivitasnya, prasarana dan sarannya akan dapat menunjukkan ruang lingkup olahraganya. Jika olahraga merupakan salah satu instrumen pembangunan nasional, maka ruang lingkup pembangunannya harus meliputi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi. Di samping itu, juga harus dipikirkan dan dibangun prasarana dan sarana kegiatan olahraga untuk individu/masyarakat berkebutuhan khusus. Dengan demikian,

dapat disimpulkan bahwa olahraga pendidikan adalah olahraga yang mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial peserta didik (siswa/mahasiswa) melalui proses pembelajaran yang dirancang, dilaksanakan dan dievaluasi dengan baik dan benar dengan tujuan utama untuk mengoptimalkan kemampuan psikomotor (sehat, bugar dan terampil), kognitif (cerdas) dan afektifnya (berkarakter). Olahraga rekreasi adalah olahraga yang mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial pelakunya melalui proses aktivitas jasmani/pelatihan dengan tujuan utama agar sehat, bugar dan produktivitas, gembira, membangun hubungan sosial yang positif dengan orang lain, juga dapat melestarikan budaya dengan kegiatan olahraga tradisional. Adapun olahraga prestasi adalah olahraga yang mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial atlet untuk mencapai kinerja yang tinggi (prestasi) tingkat daerah, regional, nasional, maupun internasional dan dengan demikian akan dapat mengangkat harkat, martabat dan kehormatan individu, keluarga, masyarakat, dan bangsa.

PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI

Pembinaan olahraga merupakan usaha yang merupakan proses untuk mencapai prestasi puncak. Pembinaan yang dilakukan tersebut akan sesuai dengan harapan apabila dilaksanakan secara efisien, sistematis, dan berkelanjutan, karena suatu proses pembinaan olahraga membutuhkan waktu yang lama. Pelaksanaan pembinaan olahraga memerlukan suatu wadah atau organisasi yang dapat membina atlet sehingga menjadi atlet yang handal. Selain itu adanya sarana dan prasarana atau fasilitas yang mendukung terlaksananya latihan yang sistematis dan kontinyu. Hal penting lainnya adalah sumber dana atau modal merupakan faktor pokok untuk terlaksananya tujuan suatu organisasi. Usaha pembinaan prestasi ini tidak terlepas dari campurtangan pelatih, yang mampu menguasai ilmu-ilmu kepelatihan dengan baik sesuai dengan cabang olahraganya yang dilatihnya.

Perkembangan dunia olahraga saat ini mengalami peningkatan yang sangat pesat, terutama dalam bidang pembinaan olahraga. Pembinaan olahraga merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan prestasi olahraga. Meningkat atau menurunnya prestasi olahraga itu sendiri tergantung pada berjalan atau tidaknya

pembinaan olahraga itu sendiri, baik pembinaan di lingkungan masyarakat, sekolah, tingkat daerah, nasional, maupun internasional. Pembinaan prestasi olahraga harus dilakukan secara maksimal agar tujuan yang dicapai dapat terlaksana dengan baik.

Pembinaan prestasi secara berjenjang mempunyai implikasi penting dalam pentingnya evaluasi yang harus dilaksanakan secara berkala sejak tahap perekrutan atlet sampai dengan tahap akhir pelaksanaan program pelatihan dan prestasi yang dicapai. Tercapainya pembinaan olahraga dengan baik diperlukan suatu wadah atau organisasi yang dapat membina atlet sehingga menjadi atlet yang berkualitas. Di samping itu, sarana dan prasarana serta fasilitas yang mendukung juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan atlet agar pembinaan olahraga dapat terlaksana dengan baik dengan latihan secara sistematis dan kontinyu. Hal terpenting lainnya adalah sumber dana atau modal yang merupakan faktor pokok untuk terlaksananya tujuan suatu organisasi. Dalam usaha pembinaan atlet tidak terlepas dari campur tangan seorang pelatih yang mampu menguasai ilmu-ilmu kepelatihan dengan baik sesuai cabang olah raga yang dilatihnya.

Menurut Ria Lumintuarso (2013: 15) Perkembangan prestasi olahraga merupakan akumulasi dari kualitas fisik, teknik, taktik dan kematangan psikis olahragawan yang disiapkan secara sistematis melalui proses pembinaan yang benar.

Berdasarkan uraian di atas dapat didefinisikan bahwa prestasi dapat berkembang dan meningkat melalui sistem pembinaan yang baik adalah dengan menjalankan pembinaan prestasi olahraga dengan maksimal secara berjenjang dan berkesinambungan.

METODE

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan mengamati tingkah laku dari orang-orang yang ingin diteliti. Menurut Sugiyono (2008:11) mengatakan bahwa penelitian deskriptif menggambarkan suatu gejala sosial

yang muncul pada masyarakat. Menurut Sugiyono (Dalam Wibisono dan Tukiman 2017) menjelaskan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Pengumpulan data peneliti menggunakan teknik dokumentasi, wawancara, observasi sebagai cara untuk mendapatkan informasi. Kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi berguna untuk mendapatkan data mengenai proses implementasi kebijakan dalam pembinaan atlet olimpiade Tokyo 2020. Penelitian dilakukan dengan meninjau langsung lokasi Penelitian nya yang berada di Lapangan Tembak Senayan, Jalan Gelora No.1 Senayan, Tanah Abang RT.01 RW.03 Gelora, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah untuk atlet berprestasi di atur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional. Di dalam peraturan presiden tersebut, atlet berprestasi dipilih oleh induk organisasi cabang olahraga untuk mengikuti pemusatan latihan nasional untuk kemudian ditetapkan oleh cabang olahraga yang bersangkutan. Hal ini juga berlaku untuk seluruh atlet termasuk atlet yang berada di SKO Ragunan. Untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasi para atlet nasional mendapat pembinaan serius dari pemerintah melalui berbagai kebijakan, dan prestasi para atlet nasional meningkatkan harkat dan martabat Indonesia di kancah internasional. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan prestasi atlet nasional pemerintah pusat atau daerah berkomitmen untuk melaksanakan berbagai kebijakan untuk meningkatkan prestasi atlet nasional. Hal ini tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) UU No.3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN).

Artikel ini memaparkan beberapa poin terkait kebijakan pemerintah terhadap atlet nasional (Indonesia, 2005) meliputi: 1. Kebijakan pembentukan federasi olahraga, seperti organisasi dan klub olahraga. 2. Kebijakan pendirian pusat olahraga dan pengembangan ilmu dan teknologi olahraga. 3. Kebijakan peningkatan prestasi atlet nasional. 4. Kebijakan pendidikan atau pelatihan atlet nasional. 5. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan atlet nasional. 6. Kebijakan pembentukan sistem olahraga dan pengembangan bakat atlet nasional. 7. Kebijakan pembentukan sistem informasi olahraga untuk meningkatkan prestasi atlet nasional. 8. Kebijakan dengan mewajibkan pemerintah daerah untuk membangun satu cabang olahraga dengan standar internasional.

Mengacu UU No. 3 Th 2005 tentang Keolahragaan Nasional mengatur tentang pembinaan, pembinaan, pengembangan dan koordinasi seluruh kegiatan olahraga prestasi di Indonesia. Sesuai dengan Visi dan Misi KONI. Implementasi kebijakan yang dilakukan bertumpu pada 4 aspek penting sebagai berikut : 1. Pembinaan 2. Pengawasan 3. Kesehatan 4. Psikologis.

Dalam pengimplementasian kebijakan tentunya memerlukan suatu sistem untuk menerapkan paradigma „pembangunan melalui olahraga“ tersebut melalui suatu kebijakan yang tentunya dirancang, ditetapkan serta diaplikasikan oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan hal tersebut (Won & Hong, 2015), yang tentunya memiliki fungsi sebagai pemangku kebijakan dalam sistem pemerintahan suatu Negara. Untuk pencapaian suatu prestasi atlet perlu adanya sarana sebagai tempat para atlet dan pelatih melakukan rutinitas latihan agar kemampuan para atlet bias berhasil dengan optimal. Dalam hal ini, Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tiga belas sarana olahraga yang sudah masuk dalam penarikan biaya dan sudah diatur dalam Perda No. 9/2014 aturan tentang Retribusi Daerah, sedangkan sarana olahraga yang belum ada penarikan retribusi sebanyak enam sarana olahraga. Semua komponen ini akan sangat mendukung dalam keberhasilan peningkatan atlet berprestasi baik dari segi pendanaan maupun sarana dan prasaran olahraga. Penelitian menurut Noer dan Sirait (2021) ada 6 variabel acuan terhadap kebijakan implementasi olahraga: (a) standar ukuran/tujuan dan sasaran kebijakan, (b) sumberdaya, (c)

karakteristik organisasi pelaksana, (d) sikap para pelaksana, (d) komunikasi antar organisasi pelaksana, dan (e) lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang akan dijelaskan sebagai berikut :

1. Standar ukuran/tujuan dan sasaran kebijakan.

Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah penting. Implementasi kebijakan yang berhasil, bias jadi gagal ketika para pelaksana kebijakan tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Standar dan tujuan kebijakan memiliki hubungan erat dengan disposisi para pelaksana kebijakan. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang krusial. Pelaksana kebijakan mungkin bias jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan. Sebelum membuat kebijakan terlebih dahulu tentunya sudah dilakukan pengkajian tentang kebutuhan dari sipelaku kebijakan, hal ini dilakukan guna menjawab semua kebutuhankebutuhan dan permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Selanjutnya kebijakan tersebut dimplementasikan dalam bentuk kegiatan ataupun pelaksanaan yang mendukung program kerja pemerintah. Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu, pejabat pelaksana kebijakan, atau kelompok-kelompok pemerintah dan/atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Kebijakan yang telah dibuat harus mempunyai capaian dalam suatu ukuran dan tujuan yang lebih jelas dan terarah, hal ini dilakukan agar kebijakan mencapai keberhasilan yang maksimal. Ukuran dan tujuan kebijakan diperlukan untuk mengatur, mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan program yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh Pemerintah.

2. Sumber daya

Sumber daya manusia adalah asset dalam pengimplementasian kebijakan. Sumber daya manusia adalah penggerak dari keseluruhan kebijakan keolahragaan, tanpa adanya sumberdaya manusia sebagai pelaksana kebijakan

mustahil kebijakan tersebut akan berjalan. Sumberdaya yang handal akan sangat memengaruhi terhadap kinerja para pelaksana tersebut hal ini dapat terlihat dalam sebuah organisasi yang mana organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya sumberdaya manusia yang akan menjalankan organisasi tersebut. Untuk itu sumberdaya manusia mempunyai peranan sangat penting terhadap keberhasilan pengimplementasian kebijakan keolahragaan. Dari hasil penelitian ini ditemukan adanya sumberdaya manusia yang cukup handal dalam pengembangan dan pembinaan atlet-atlet berprestasi, di mana para pelatih dan atlet dapat bekerja sama untuk menjalankan kebijakan sehingga kebijakan tersebut dapat berfungsi dengan optimal. Para pelatih yang mempunyai sertifikasi yang cukup baik akan mampu menjadi ujung dari keberhasilan peningkatan prestasi atlet. Kedua, ketersediaan dana. Masalah anggaran ini akan menjadi hal yang sangat krusial terlebih segala bentuk kegiatan harus diawali dengan adanya ketersediaan dana dalam suatu organisasi. Peranan dana ini akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembinaan peningkatan atlet. Anggaran sudah menjadi masalah yang umum yang sampai saat ini Pemerintah pusat ataupun daerah belum secara optimal dapat mengatasinya. Dalam menjalankan kebijakan perlu adanya dukungan atau peran dari pemangku kepentingan lainnya. Anggaran yang harus dikeluarkan untuk penyelenggaraan keolahragaan cukup banyak, diawali dengan kegiatan pembibitan atlet lalu pembinaan, pengembangan sampai pada tahap akhir peningkatan prestasi atlet. Kesemuanya ini menjadi satu kesatuan untuk tercapainya keberhasilan implementasi kebijakan keolahragaan yang akan berdampak pada peningkatan prestasi atlet. Ketiga, sumberdaya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana adalah hal yang sangat konflik karena sarana dan prasarana sangat membutuhkan biaya yang cukup besar dan harus terencana dari semua aspek dalam mendukung implementasi kebijakan. Sumberdaya Sarana dan prasarana ini sangat erat hubungannya dengan kebijakan keolahragaan. Sumber daya sarana dan prasarana akan membuktikan dari tingkat keberhasilan suatu kebijakan. Dimana kebijakan tersebut harus dapat memfasilitasi seluruh aspek yang berkaitan dalam peningkatan

pengembangan dan pembinaan para atlet-atlet. Sumber daya sarana dan prasarana menjadi hal yang sangat diperhatikan mengingat banyaknya cabang olahraga yang membutuhkan untuk tempat latihan. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki cabang olahraga menembak sudah sangatlah bagus dan memadai untuk para atlet melakukan latihan rutin.

3. Karakteristik Organisasi

Pelaksanaan Organisasi adalah perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang untuk bekerjasama, terkendali dan dipimpin untuk tujuan tertentu. Organisasi biasanya memanfaatkan suatu sumber daya tertentu misalnya lingkungan, cara atau metode, material, mesin, uang, dan beberapa sumber daya lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi tersebut. Orang-orang yang terkumpul dalam sebuah organisasi sepakat untuk mencapai tujuan tertentu melalui sumber daya secara sistematis dan rasional yang terkendali dan adanya pemimpin organisasi yang akan memimpin operasional organisasi dengan terencana. Tugas pokok dan fungsi dalam suatu organisasi sangat diperlukan pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Oleh sebab itu perlu adanya kecocokan para pelaksana terhadap kebijakan yang akan dijalankan. Organisasi sebagai pengurus cabang olahraga sangat dibutuhkan karena dengan adanya kepengurusan maka dalam pencapaian akan pelaksanaan program maupun kegiatan akan sesuai dengan output yang diharapkan. Oleh karena itu keharmonisan suatu kepengurusan dalam cabang olahraga juga sangat mempengaruhi terhadap kualitas terhadap peningkatan atlet berprestasi. Dari hasil penelitian variable ini menunjukkan bahwa karakteristik organisasi pelaksana ini cukup baik, di mana keterlibatan antara organisasi formal dan informal yang saling bersinergi dalam melaksanakan implementasi kebijakan yang nantinya akan berdampak kepada peningkatan atlet berprestasi.

4. Sikap atau disposisi para pelaksana

Kebijakan publik dapat terlaksana apabila arah dan tujuannya sudah jelas, sehingga para pelaksana dapat melaksanakan dengan baik dan benar. Para individu harus dapat memahami apa yang menjadi tujuan dari sebuah kebijakan. Dalam hal ini sikap para pelaksana harus mampu berkomunikasi dengan baik kepada atasan ataupun kepada sesama pelaksana. Penyampaian komunikasi harus jelas dan terurai dalam penjabarannya, karena apabila sipelaksana menyalah artikan penerimaan informasi maka akan mengalami gangguan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Sikap pelaksana harus mampu menunjukkan kemauannya dalam melaksanakan suatu instruksi atau perintah dari atasan, karena jika sikap pelaksana menunjukkan penolakan dari para pelaksana maka hal ini akan memepengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Beberapa infomasi yang dapat diterima oleh para pelaksana diantaranya secara verbal ataupun secara tulisan. Jika secara verbal mungkin masih bias mengurangi kesalahpahaman dalam mengimplemetasikan kebijakan, tetapi jika komunikasi tersebut secara disposisi yang berupa tulisan singkat maka penjabaran ini bias disalahartikan. Oleh karena itu, para pelaksana kebijakan harus benar-benar memahami dan menguasai apa yang menjadi permasalahan yang sedang dihadapi. Implementasi Kebijakan yang efektif sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten. Dari uraian diatas diharapkan para pemangku kepentingan mampun menjadi jembatan kepada seluruh pelatih ataupun atlet agar apa yang menjadi masalah masalah mereka dilapangan akan dapat diselesaikan dengan baik, untuk itu perlunya suatu arahan atau instruksi yang baik sangatlah dibutuhkan. Dalam suatu organisasi hubungan antara pelatih dan atlet ibarat hubungan antara orangtua dan anak. Hubungan dan komunikasi yang baik akan mendapatkan hasil yang baik juga. Komunikasi yang terjalin juga harus cukup terarah agar apa yang dituju akan tercapai. Dari hasil penelitian pada variable ini ditemukan bahwa hubungan dalam organisasi Perbakin sudah sangatlah baik dan kolaborasi setiap pihak sangatlah terarah dan jelas.

5. Komunikasi antar organisasi pelaksana

Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan atau ide dari seseorang ke orang lain. Komunikasi dalam suatu organisasi sangat diperlukan, hal ini dikarenakan komunikasi sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini bias saja terjadi karena kebijakan yang dilaksan akan adalah bukan kebutuhan dari masyarakat setempat yang mengenal betul akan permasalahan yang merekahadapi, akan tetapi kebijakan publik tersebut biasanya bersifat dari atas kebawah sehingga memungkinkan para pengambil keputusan tidak mengetahui atau bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan. Pentingnya suatu komunikasi dalam organisasi guna mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan dapat dilaksanakan. Seringnya kegagalan implementasi kebijakan dikarenakan kepentingan-kepentingan para pimpinan, sehingga berdampak terhadap pola pikir dan pandangan para pelaksana terhadap implementasi kebijakan. Disamping itu, kemampuan dan kemauan para pelaksana juga harus dipertanyakan, apakah para pelaksana sudah mengetahui betul dan paham akan apa yang menjadi tujuan dari kebijakan. Terdapat tiga macam elemen respon yang dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauannya untuk melaksanakan suatu kebijakan, antara lain terdiri dari pertama, pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan dan ketiga Intensitas terhadap kebijakan. Dari elemen tersebut merupakan satu kesatuan dari serangkaian keberhasilan implementasi kebijakan. Pengetahuan pelaksana akan isi dari kebijakan sangat menentukan hasil dari kebijakan, pemahaman dan pendalaman isi dari kebijakan juga sangat memegang peranan yang penting agar pada saat pelaksanaannya kebijakan tersebut sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Minat atau Intensitas para pelaksana juga sangat diperlukan. Hubungan yang baik akan terlihat dari keberhasilan komunikasi yang dijalin apakah komunikasi tersebut berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau sebaliknya. Peranan stake holder dalam komunikasi terhadap apa yang menjadi permasalahan di para atlet adalah sangat dibutuhkan. Dengan adanya komunikasi yang baik akan dapat menyelesaikan permasalahan dengan baik

pula. Dari hasil penelitian pada variable ini menunjukkan bahwa komunikasi antar organisasi pelaksana sudah berjalan cukup optimal hal ini terlihat dari kolaborasi para pemangku kepentingan dalam menjalankan kegiatan dengan tujuan untuk peningkatan para atlet berprestasi. Saling melengkapi kekurangan sesama organisasi di bidang keolahragaan juga menjadi hal yang sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yang tujuan akhirnya adalah peningkatan atlet berprestasi.

6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal dapat berperan aktif dalam keberhasilan kebijakan keolahragaan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Lingkungan sosial ,ekonomi dan politik akan sangat mempengaruhi terhadap kegagalan para atlet dalam peningkatan prestasi, di mana pada zaman ini banyaknya pengaruh–pengaruh buruk dari media sosial yang sangat dominan. Oleh sebab itu perlu adanya peran pemangku kepentingan dalam menghadapi permasalahan yang ada agar tidak terjadinya hambatan dalam melaksanakan tujuan. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial,ekonomi dan politik sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan, hal ini terlihat dari keberhasilan tingkat ekonomi yang cukup tinggi di Perbakin dengan banyaknya pusat-pusat perbelanjaan yang besar, juga banyaknya penggalangan bidang keolahragaan yang dilaksanakan senam setiap hari Jumat di kantor Perbakin.

PENUTUP

Simpulan Suatu negara harus memberikan perhatian khusus kepada sistem keolahragaan, termasuk Indonesia, khususnya peningkatan prestasi atlet nasional di berbagai cabang olahraga. Peningkatan prestasi atlet nasional berkaitan kuat dengan harga diri, martabat, dan kebanggaan tersendiri dari suatu negara. Sehingga pemerintah harus menempatkan posisi olahraga, termasuk atlet nasionalnya sebagai

aspek penting, disamping aspek lainnya. Untuk meningkatkan prestasi atlet nasional, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan tentang pembinaan prestasi atlet nasional, seperti UU No. 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UUSKN) dan UU No. 40/2009 tentang Kepemudaan. Dalam implementasi nya, Kemenpora memilah telah memilah dua bidang kebijakan menjadi umum dan khusus. Kebijakan umum, yaitu berupa gambaran besar yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan prestasi atletnya. Sedangkan kebijakan khususnya berupa perbaikan prestasi atlet nasional dalam bidang sepak bola.

Dalam implemetasi kebijakan peningkatan prestasi atlet nasional ditemui faktor-faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung berupa: potensi generasi muda yang sangat besar, kerjasama antarintansi pemerintah (pusat-daerah) dalam pembinaan atlet, dan tersedianya kebijakan pemerintah sebagai dasar pembinaan atlet. Sedangkan faktor penghambat berupa: belum adanya sinergitas antar lembaga keolahragaan dalam membina atlet, regenerasi atlet yang terhambat akibat rendahnya minat masyarakat untuk berolahraga, hambatan pengarahan bakat dan minat seauai dengan ketentuan internasional, buruknya pusat pelatihan atlet nasional, dan dukungan masyarakat yang terbilang kecil terhadap atlet nasional. Berbagai faktor pendorong dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut juga harus disikapi oleh pemerintah Indonesia secara bijaksana sebagai langkah meningkatkan prestasi atlet nasional. Maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan prestasi atlet tidak bias dilepaskan dari adanya sinergi dan kerjasama antara seluruh pemangku kepentingan, dalam hal ini DISPORA, KONI, FORMI, atlet, vendor,dan pelatih. Dari beberapa variabel, terdapat dua variabel yang sangat mempengaruhi terhadap peningkatan atlet berprestasi yaitu Pertama, sumber daya, di mana ada sumber daya keuangan/pendanaan dan sumber daya sarana dan prasarana yang masih dalam masalah yang belum terselesaikan. Pendanaan yang sangat minim sekali terhadap uang pembinaan, uang bonus dan juga uang jasa atlet pada saat event kejuaraan tingkat Provinsi. Pendanaan yang sangat minim akan sangat mempengaruhi terhadap peningkatan prestasi atlet. Selain itu, sumberdaya sarana dan prasarana juga masih dalam kondisi yang minim sekali dikarenakan banyaknya sarana olahraga yang belum layak atau ukuran yang belum standard, selain itu para atlet dan pelatih masih

mempergunakan sarana olahraga dari pihak swasta dengan cara penyewaan dengan membayar sistem bayar iuran bulanan melalui club-club olah raga. Kedua, sikap para pelaksana, dimana variable ini diketahui adanya stakeholder yang tidak berperan aktif dikarenakan organisasi tersebut tidak beroperasi. Hal ini disebabkan karena para pelaksana tidak melakukan kebijakan keolahragaan di mana para pelaksana tidak mengetahui dan memahami apa yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut. Ketidakberperannya organisasi ini dikarenakan tidak cukup mampu dan memiliki pemahaman yang kurang akan menjalankan suatu organisasi. Hal ini akan sangat mempengaruhi terhadap peningkatan prestasi atlet. Kedua variable ini saling berkaitan dalam menjalankan perannya di bidang keolahragaan, dimulai dari pendanaan, pembinaan sehingga tercetaklah atlet-atlet berprestasi. Berdasarkan hasil uraian kesimpulan dari penelitian di lapangan mengenai sinergi pemangku kepentingan dalam peningkatan prestasi atlet ada beberapa rekomendasi yang bias diajukan, yaitu: Pertama, membuat strategi Memorandum Of Understanding (MOU) dalam rangka peningkatan prestasi olahraga kepada semua pihak yang terkait dalam bidang keolahragaan contohnya; kerjasama dengan pihak-pihak sekolah swasta yang mempunyai banyak sarana dan prasarana olahraga yang dapat mendukung pada saat adanya event-event kejuaraan bergengsi baik tingkat Nasional ataupun Internasional. Kedua, sinergi pemangku kepentingan terhadap keberhasilan implementasi kebijakan keolahragaan dimulai dari beberapa sumber, pertama meningkatkan sumberdaya pendanaan keolahragaan mulai dari uang pembinaan kepada atlet dan pelatih, uang pemberian penghargaan (bonus) tingkat Provinsi dan juga uang untuk jasa atlet selama bertanding dalam suatu event kejuaraan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian peneliti ingin menambahkan saran. Saran tersebut antara lain: Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang diajukan adalah:

1. Bagi Kemenpora hendaknya dapat meningkatkan dukungan baik materi maupun non materi dalam.

2. Pengembangan olahraga secara menyeluruh agar kondisi keolahragaan dapat berada dalam kondisi yang terbaik,
3. Kemenpora hendak nya merumuskan dan merencanakan untuk mengembangkan olahraga sebagai salah satu prioritas dalam rencana pembangunan mendapat dukungan penuh dan menjadi prioritas.
4. Perlu ditingkatkan kerjasama yang baik antar instansi keolahragaan, dukungan pemerintah dan membangun sinergisitas antar lembaga olahraga sehingga dapat lebih meningkatkan prestasi atlet.
5. Disarankan melakukan penelitian yang lebih lama, dengan melakukan wawancara yang lebih mendalam, sehingga dapat diketahui permasalahan dan solusi dalam implementasi kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad, Imran (2012) KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN OLAHRAGA NASIONAL PADA FASE PEMBIBITAN. Medan

Asyiah, Adnan, dan Mubarak. 2017. Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis di Kabupaten Pasaman. Journal of Publik Sector Innovation

Bahtiar, Jamarudin, 2018, Kebijakan Pembinaan Atlet Pusat Pendidikan Dan Latihan Pelajar Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga Provinsi Sulawesi Tenggara

Dian Estu Prasetyo, Damrah dan Marjohan .2018. Evaluasi kebijakan pemerintah daerah dalam pembinaan prestasi olahraga dalam Jurnal Pendidikan Jasmani dan Olahraga, Volume 1, Nomor 2

Dwi, H. (2016). Fakta Sejarah Kiprah dan Prestasi Indonesia di Olimpiade

Dwi Prayogo Utomo. 2018. Stud Implementasi Kebijakan Terhadap Penghargaan Atlet Berprestasi. Jakarta

Fauzi Handoko Arif. 2021. Sering bawa Emas Olimpiade, KOI Minta Cabang Olahraga Lain Tiru Cabang Bulu Tangkis. Jakarta

Fitri Supratiwi.2020.Perbakin Jaring Atlet Muda Potensial Lewat Kejuaraan Daring.Jakarta

Glenn Clifton Apfel.2018. Meraih Emas di Olympic Youth Games 2014 dan 2018.Jakarta

Hadjarati, H. (2009). Memberdayakan Olah Raga Nasional. Jurnal Pelangi Ilmu, 2(5), 204– 220

Harahap, Insan Harapan. 2018. Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Prestasi Atlet Nasional dalam Journal of Entrepreneurship Management and Industry Volume 1 Nomor 4

Husdarta, H. J. S. (2011). Sejarah dan Filsafat Olahraga. Bandung: Alfabeta

Humas Polhukam. (2017). Kemenpora Siap Melaksanakan 4 Program Prioritas Percepatan Pembangunan Sepakbola Nasional

Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (2005) Indonesia

Jarot Sutrisno, Zulkarnaen, & Noh., M. M. (2012). Peran Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga dalam Meningkatkan Prestasi Olahraga di Kabupaten Pontianak. Universitas Tanjungpura

Junaydi Suswanto.2019. Menpora Optimistis Cabang Menembak Mampu Penuhi Target Emas. Jakarta. Kamal. 2011. Evaluasi Program Pembinaan Olahraga Tenis Lapangan Di Kota Padang. Journal media keolahragaan Indonesia

Lutan, 2000. Model Evaluasi dalam Konteks Pemassalan dan Pembibitan. Jakarta. Depdiknas

Menpora, 2013, Grand Strategi Pembangunan Olahraga Prestasi Melalui Penguatan Program Indonesia Emas.

M. E. Winarno, 2013, Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani, Malang, UM Press

Soan F. U, 2015, Makalah, Pembinaan Manajemen Organisasi Olahraga, Palangka Raya, Dispora Kalimantan Tengah.

Toho Cholik Mutohir, 2014, Makalah, Kebijakan Olahraga Nasional dan Penguatan Tataan Kelembagaan. Jakarta, Menpora

9. UU RI NO. 3 Tahun 2005. Tentang Sistem Keolahragaan Nasional. Jakarta, Menpora